

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian penulis yang berjudul “Dinamika Kebijakan Adopsi *Bitcoin* oleh El Salvador Periode 2021–2025: Analisis Bentuk Ketergantungan Baru Terhadap Tatanan Ekonomi Global” menyimpulkan bahwa visi Presiden Nayib Bukele untuk melepaskan El Salvador dari dominasi tatanan ekonomi global dan hegemoni Dolar Amerika Serikat tidak tercapai secara optimal. Kebijakan adopsi *Bitcoin*, yang pada awalnya diposisikan sebagai strategi inovatif menuju kedaulatan ekonomi, inklusi keuangan, dan efisiensi remitansi, justru menciptakan ironi. Alih-alih memutus rantai ketergantungan lama, El Salvador justru memasuki konfigurasi ketergantungan yang lebih kompleks. Dalam perspektif historical-structural Cardoso dan Faletto (1979), temuan ini menunjukkan keberlanjutan relasi asimetris antara negara pusat dan negara pinggiran, di mana inovasi finansial yang tidak ditopang oleh kapasitas domestik hanya menghasilkan associated dependent development, yaitu pembangunan yang berlangsung tetapi tetap bergantung pada struktur serta aktor eksternal. Fenomena ini semakin jelas ketika dilihat melalui konsep path dependency, sebab keputusan dolarisasi pada tahun 2001 menciptakan jalur kebijakan yang membatasi pilihan negara di masa berikutnya dan berkontribusi langsung pada cara El Salvador merancang kebijakan adopsi *Bitcoin* pada tahun 2021. Pola ketergantungan historis tersebut kemudian membentuk trayektori baru yang memunculkan tiga bentuk ketergantungan yang saling berkaitan, yaitu ketergantungan teknologi, finansial, dan moneter.

Dimensi pertama adalah ketergantungan teknologi, yang terlihat dari ketidakmampuan El Salvador untuk menguasai infrastruktur digital yang menopang kebijakan *Bitcoin*. Negara ini tidak berkembang sebagai produsen teknologi, tetapi sebagai pengguna yang bergantung pada perusahaan *fintech* asing berbasis Amerika Serikat, seperti *Athena Bitcoin*, *BitGo*, dan *AlphaPoint*, untuk penyimpanan aset, keamanan sistem, serta operasional *Chivo Wallet*. Situasi ini diperkuat oleh efek penguncian (*lock-in effect*) teknologi pada mesin ATM *Bitcoin* yang dibangun

dengan sistem tertutup milik *Genesis Coin*, sehingga pemerintah tidak memiliki kendali atas pembaruan maupun perbaikan teknis. Selain itu, proses verifikasi identitas yang dijalankan oleh pihak ketiga asing melemahkan kedaulatan data nasional dan menimbulkan kerentanan keamanan siber. Keseluruhan kondisi tersebut menegaskan bahwa modernisasi digital yang dicapai El Salvador berlangsung dalam orbit teknologi yang dikendalikan oleh yurisdiksi negara pusat.

Dimensi kedua adalah ketergantungan finansial, yang muncul ketika upaya mencari alternatif pendanaan justru mempersempit ruang fiskal negara. Setelah pengesahan Undang-Undang *Bitcoin*, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti *Moody's* dan *Fitch* menurunkan peringkat utang El Salvador ke level *junk grade*, yang meningkatkan biaya pinjaman dan menutup akses terhadap pasar modal swasta. Tekanan likuiditas yang muncul kemudian memaksa pemerintah kembali bergantung pada *International Monetary Fund* (IMF), yang menjadikan revisi kebijakan *Bitcoin* sebagai prasyarat pencairan fasilitas pembiayaan. Selain itu, operasional sistem pembayaran *Chivo* yang bergantung pada bank mitra Amerika Serikat, *Silvergate Bank*, menunjukkan bahwa klaim desentralisasi tidak sepenuhnya akurat. Keruntuhan *Silvergate* memperlihatkan bagaimana sistem pembayaran nasional tetap terhubung pada stabilitas sektor perbankan global yang berada di bawah yurisdiksi negara pusat.

Dimensi ketiga adalah ketergantungan moneter, yang memperlihatkan kegagalan upaya de-dolarisasi dan penguatan kembali posisi Dolar Amerika Serikat dalam perekonomian nasional. Harga *Bitcoin* terbukti sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan *The Federal Reserve* dan dinamika likuiditas global, sehingga perekonomian El Salvador menghadapi eksposur ganda terhadap volatilitas nilai tukar kripto dan kebijakan moneter negara pusat. Dana perwalian FIDEBITCOIN pun tidak berhasil menciptakan otonomi moneter karena tetap menggunakan dolar sebagai jangkar stabilitas untuk menyerap fluktuasi harga *Bitcoin*. Reformasi hukum pada tahun 2025 yang mengubah *Bitcoin* dari alat pembayaran wajib menjadi sukarela serta pelarangan pembayaran pajak dalam kripto semakin

menegaskan bahwa dolar tetap berfungsi sebagai satu-satunya referensi moneter yang stabil bagi negara tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan relevansi konsep *New Dependency* dan *Digital Dependency*, yang menunjukkan bahwa negara pinggiran yang mengadopsi teknologi global tanpa kesiapan institusional dan kapasitas domestik berisiko memperkuat, bukan mengurangi, relasi ketergantungan struktural terhadap tatanan ekonomi global yang termasuk negara pusat dan lembaga internasional. Adopsi *Bitcoin* di El Salvador tidak menghasilkan kemandirian ekonomi, melainkan integrasi yang lebih dalam ke dalam jaringan modal spekulatif dan infrastruktur teknologi yang dikendalikan oleh aktor kunci dan struktur tatanan ekonomi global. Dengan demikian, pengalaman El Salvador selama periode 2021–2025 memberikan pelajaran penting bahwa kedaulatan moneter di era digital tidak mungkin dicapai tanpa kedaulatan teknologi, kapasitas institusional yang memadai, dan stabilitas fundamental ekonomi domestik.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan baik untuk pengembangan kajian akademis di bidang Ekonomi Politik Internasional maupun untuk kebutuhan praktis para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan ekonomi dan teknologi finansial. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi penelitian selanjutnya serta panduan bagi para pengambil keputusan dalam menghadapi dinamika tatanan ekonomi global yang terus berkembang.

### 6.2.1 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian Ekonomi Politik Internasional yang menyoroti hubungan antara teknologi finansial, struktur tatanan ekonomi global, dan pembangunan. Melalui analisis mendalam terhadap kasus El Salvador, penelitian ini menghadirkan

beberapa manfaat akademis yang memperkaya diskursus teoritis maupun metodologis dalam studi hubungan antara negara pinggiran dan dinamika ekonomi global.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Teori Dependensi, khususnya konsep *Associated Dependent Development* dari Cardoso & Faletto (1979) serta *New Dependency* dari B. N. Ghosh (2019), tetap sangat relevan untuk memahami fenomena kontemporer di era digital. Temuan penelitian menegaskan bahwa pola hubungan antara pusat dan pinggiran tidak lenyap akibat kemajuan teknologi finansial, tetapi justru mengalami transformasi bentuk. Modernisasi melalui adopsi teknologi tinggi seperti *cryptocurrency* tidak otomatis menghasilkan kemandirian, melainkan berpotensi mereproduksi struktur ketergantungan lama dalam konfigurasi baru apabila tidak disertai kemampuan domestik untuk menguasai teknologi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi relevansi teori *dependency*, tetapi juga memperluasnya dengan menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat memperdalam relasi asimetris dalam tatanan ekonomi global.

Penelitian ini turut memberikan kontribusi teoritis melalui pengoperasionalisasi konsep *Digital Dependency* (Mayer dan Lu, 2025) dalam konteks negara tertentu. Analisis ini memetakan bagaimana bentuk ketergantungan modern tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditas atau pembiayaan eksternal, tetapi juga merambah ke infrastruktur digital seperti perangkat keras, kode pemrograman, jaringan data, dan platform transaksi. Temuan ini membuka ruang diskusi baru mengenai erosi kedaulatan negara ketika infrastruktur digital vital dikelola oleh korporasi teknologi multinasional yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan dalam Hubungan Internasional semakin ditentukan oleh aktor non-negara yang menguasai infrastruktur teknologi.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi kritis terhadap literatur yang menganggap *cryptocurrency* sebagai instrumen pembebasan ekonomi

atau sarana desentralisasi kekuasaan. Dengan menunjukkan bahwa upaya El Salvador untuk melepaskan diri dari hegemoni Dolar Amerika Serikat justru memperkuat ketergantungannya terhadap kebijakan moneter negara pusat, penelitian ini menantang asumsi determinisme teknologi yang sering muncul dalam narasi *techno-utopianism*. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi tidak berfungsi secara netral, tetapi dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan hierarki ekonomi politik global. Kontribusi ini memperkaya kajian kritis yang berfokus pada keterbatasan peran teknologi dalam mendorong pembangunan yang benar-benar mandiri.

Selain itu, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis yang membagi ketergantungan baru ke dalam tiga dimensi, yaitu teknologi, finansial, dan moneter. Pengelompokan ini memberikan model konseptual yang sistematis untuk memahami bagaimana berbagai jenis ketergantungan muncul dan saling memperkuat dalam konteks negara pinggiran yang mengadopsi inovasi digital. Kerangka ini dapat digunakan sebagai dasar analisis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika serupa di negara-negara *Global South*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi substantif melalui studi kasus El Salvador, tetapi juga menawarkan perangkat analitis yang dapat diterapkan secara lebih luas dalam kajian Ekonomi Politik Internasional.

### 6.2.2 Saran Praktis

Selain memberikan saran dalam ranah akademis, penelitian ini juga menghasilkan sejumlah manfaat praktis yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi para pembuat kebijakan, lembaga internasional, maupun aktor yang terlibat kerja sama dalam konteks teknologi global dan *cryptocurrency*. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan teknologi yang lebih adaptif, serta membantu para pemangku kepentingan untuk menavigasi risiko dan peluang yang muncul di tengah perkembangan pesat teknologi finansial. Dengan demikian, manfaat praktis yang dihasilkan tidak

hanya relevan bagi konteks El Salvador, tetapi juga bagi negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan inovasi digital ke dalam struktur perekonomian nasional.

Penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi negara-negara berkembang atau *periphery* lain yang mempertimbangkan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah atau cadangan strategis nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi inovasi finansial global tanpa kesiapan infrastruktur domestik, kapasitas teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai berpotensi menjerumuskan negara ke dalam struktur ketergantungan baru yang bersifat asimetris. Kasus El Salvador dapat dijadikan peringatan bahwa keuntungan jangka pendek berupa efisiensi transaksi tidak sebanding dengan risiko jangka panjang berupa instabilitas fiskal dan melemahnya otonomi ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu menilai secara cermat kesiapan institusional sebelum mengadopsi instrumen finansial yang memiliki volatilitas tinggi.

Selain itu, apabila negara lain berencana mengembangkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau mengadopsi aset *cryptocurrency* dan *Bitcoin* dalam kebijakan moneter dan fiskal, aspek kedaulatan digital harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Infrastruktur inti seperti *server*, pusat data, dan kustodian *private key* perlu dipastikan berada dalam yurisdiksi domestik melalui prinsip *data residency*, bukan disimpan di layanan *cloud computation* yang dimiliki perusahaan asing yang tunduk pada regulasi negara pusat seperti Amerika Serikat. Ketergantungan pada infrastruktur digital asing bukan hanya membuka kerentanan keamanan, tetapi juga menciptakan ketergantungan struktural baru yang berpotensi melemahkan kontrol negara terhadap sistem pembayaran dan cadangan digital nasional.

Bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran fokus dari sekadar adopsi teknologi menuju pembangunan kemandirian teknologi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kedaulatan moneter di era digital tidak dapat dicapai tanpa penguasaan atas

infrastruktur dasar, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang menjadi fondasi sistem keuangan digital. Dengan demikian, strategi pembangunan ekonomi ke depan perlu memprioritaskan penguatan kapasitas domestik, termasuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur teknologi nasional, sebagai prasyarat sebelum mengintegrasikan instrumen finansial global yang bersifat fluktuatif.

Penelitian ini juga memberikan wawasan praktis mengenai batas otonomi kebijakan ekonomi dalam struktur politik ekonomi internasional. Temuan menunjukkan bahwa lembaga keuangan internasional seperti IMF dan lembaga pemeringkat kredit beroperasi sebagai mekanisme pendisiplinan pasar yang dapat membatasi ruang gerak negara ketika kebijakan ekonomi yang diambil dianggap menyimpang dari norma keuangan global. Pemahaman ini sangat relevan bagi diplomat, negosiator ekonomi, dan pembuat kebijakan, karena menegaskan bahwa kebijakan finansial yang bersifat disruptif memerlukan perhitungan risiko yang matang agar tidak berujung pada isolasi finansial atau pembatasan akses terhadap pendanaan internasional.

Bagi para praktisi yang bergerak dalam kerja sama teknologi internasional, penelitian ini mengungkap berbagai risiko yang sering terabaikan ketika negara bergantung pada vendor teknologi asing. Ketergantungan El Salvador pada perusahaan swasta asing dalam pengelolaan wallet digital dan keamanan data memperlihatkan pentingnya memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mencegah efek penguncian (*lock-in effect*) teknologi serta memastikan perlindungan terhadap kedaulatan data warga negara. Analisis ini menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan kontrol negara yang lebih besar dalam proyek strategis nasional yang melibatkan pihak eksternal agar risiko jangka panjang dapat diminimalkan.